



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, ini sebagaimana amanat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Dokumen Renja ini mengacu pada RKPDP Tahun 2022 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang menurut rencana program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam tugas dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki 3 urusan wajib yaitu Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Akhirnya, kami berharap semoga Dokumen Rencana Kerja yang disusun ini, dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

Pontianak, September 2021

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat**



**SAMUEL, SE, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660408 199303 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II    HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	12
2.1 Evaluasi Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah .....	21
2.4 Review Rancangan Awal RKPD .....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	25
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	27
BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	62
4.1 Indikator Kegiatan .....	62

4.2	Kelompok Sasaran .....	66
4.3	Kebutuhan Pendanaan Indikatif .....	71
4.4	Sumber Dana .....	71
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>

LAMPIRAN I TABEL RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
PEMRINTAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN  
2022.

LAMPIRAN II TABEL REVISI CASCADING DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian Dan Bidang Statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan non pelayanan dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian, yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah sangat terkait dengan dokumen RKPD dan RENSTRA yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RENSTRA SKPD dan Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang saat ini masih dalam proses revisi dalam rangka menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Namun Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sejalan dengan proses revisi RPJMD, juga sedang dilaksanakan penyusunan Revisi Rencana Strategis yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja wajib menyusun Dokumen Renja. Rencana Kerja merupakan sebuah dokumen rencana pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi alat ukur penilaian capaian kinerja perangkat daerah. Rumusan Dokumen Renja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Sebagai OPD di lingkungan Pemprov. Kalbar, Diskominfo telah merumuskan tujuan dan sasaran yang kemudian diuraikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD dan RENSTRA. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menjalankan peran terutama mewujudkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan memberikan layanan informasi, pengembangan teknologi informasi komunikasi, menjamin keamanan informasi dan menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi.

**a. Kedudukan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



**b. Tugas Pokok**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

**c. Fungsi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. perumusan program kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi Publik, Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, serta Persandian dan Statistik;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Struktur/Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 124 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi Publik;
- d. Bidang Komunikasi Publik;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Persandian dan Statistik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT Fund);
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 07);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Satu Data;
35. Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

- a. Sebagai langkah untuk menjaga konsistensi arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2018-2023.
- b. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar Tahun 2018-2023.
- c. Sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan dan melaksanakan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 yang akan dibiayai dari APBD Provinsi Kalimantan Barat.

#### **2. Tujuan**

- a. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran program dan kegiatan dalam mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah.
- b. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah.
- c. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan dan pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja Perangkat Daerah

- 4.1 Indikator Kegiatan
- 4.2 Kelompok Sasaran
- 4.3 Kebutuhan Pendanaan Indikatif
- 4.4 Sumber Dana

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pencapaian Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 10 sub kegiatan;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 kegiatan dan 11 sub kegiatan;
- c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Dalam rangka pencapaian program prioritas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 telah didukung melalui APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.866.748.402,- dan mengalami penyempurnaan anggaran bertambahnya sebesar Rp. 785.329.730,- sehingga pagu penyempurnaan menjadi Rp. 23.652.078.132,-



**TABEL : 2.1  
Realisasi Program dan Kegiatan Sampai Dengan Bulan Agustus  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun Anggaran 2021**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	23.652.078.132,00	10.771.933.312,00	45,54
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.084.974.194,00	10.573.389.354,00	45,80
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.649.693.346,00	6.255.177.061	58,74
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	327.514.549,00	185.783.075,00	56,73
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.532.419,00	65.756.786	75,99
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.794.907,00	4.764.907	30,17
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.831.392,00	323.475	2,18
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.355.831,00	114.937.907	54,64
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.221.719.834,00	5.543.061.093	60,11
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.669.339.402,00	4.636.780.774	60,46

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.200.000,00	1.902.900	36,59
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.472.090.400,00	862.302.560	58,58
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	37.948.156,00	18.501.959	48,76
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.999.492,00	16.326.100	96,04
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.142.384,00	7.246.800	35,98
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.998.391,00	104.081.941	55,96
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	61.346.750,00	61.100.000	9,96
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105.151.641,00	41.281.941	39,26
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	8.000.000,00	880.000	11,00
2.16.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	820.000	16,40
2.16.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000,00	-	0
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.635.393,00	130.454.633	53,99
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.489.215,00	15.499.560	88,62

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.514.108,00	21.711.000	62,90
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.931.715,00	5.899.206	85,10
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.040.000,00	15.660.000	44,69
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.569.000,00	17.240.700	62,54
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.400.000,00	3.225.000	50,39
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.021.437,00	43.748.701	44,63
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.669.918,00	7.470.466	47,67
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.452.618,00	-	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.704.830,00	-	0
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	71.747.788,00	-	0
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	408.482.561,00	225.369.019	55,17
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	766.125,00	-	0
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.300.000,00	106.309.083	68,45
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000,00	1.200.000	14,29

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.016.436,00	117.859.936	48,30
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.890.000,00	66.427.300	42,34
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.340.000,00	37.534.300	45,58
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.550.000,00	28.893.000	41,54
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	-	0
2.16.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>3.203.689.123,00</b>	<b>2.148.956.800</b>	<b>67,08</b>
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	3.203.689.123,00	2.148.956.800,00	67,08
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	113.685.299,00	39.774.400	34,99
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	169.109.292,00	96.400.800	57,01
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	240.105.981,00	107.235.200	44,66
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	156.098.340,00	71.447.100	45,77

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	61.562.981,00	33.351.900	54,18
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	117.726.889,00	38.233.400	32,48
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.131.750.073,00	1.054.923.200	93,21
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45.597.428,00	7.590.800	16,65
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	700.000.000	70,00
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	168.052.840,00	-	0
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>9.231.591.725,00</b>	<b>2.169.255.493,00</b>	<b>23,50</b>
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7.403.558.350,00	1.353.932.193,00	18,29
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provins	40.920.000,00	20.320.000	49,66
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.362.638.350,00	1.333.612.193	18,11
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.828.033.375,00	815.323.300,00	44,60
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	71.806.651,00	37.606.100	52,37

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.780.493,00	3.779.200	99,97
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	458.995.522,00	275.999.300	60,13
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	-	-	0
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	529.952.355,00	127.586.500	24,08
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	4.443.255,00	2.277.800	51,26
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	717.339.548,00	355.186.400	49,51
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	14.399.484,00	2.688.000	18,67
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	27.316.067,00	10.200.000	37,34
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	360.019.970,00	125.640.990	34,90
2.20.21	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	360.019.970,00	-	34,90
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	360.019.970,00	125.640.990	34,90

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran Belanja</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp.)</b>	<b>%</b>
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	190.219.437,00	42.212.437	22,19
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	16.487.994,00	16.487.994	100,00
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	71.372.175,00	36.636.185	51,33
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	81.940.364,00	30.304.374	36,98
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	207.083.968,00	72.902.968	35,20
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	207.083.968,00	72.902.968	35,20
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	207.083.968,00	72.902.968	35,20
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.993.413,00	23.632.413	39,39
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	147.090.555,00	49.270.555	33,50

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dapat disajikan berdasarkan 5 sasaran pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	(%)
1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat Keterbukaan Informasi	Kategori Informatif / Zona Hijau	Menuju Informatif	80%
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>				<b>80%</b>
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Indeks SPBE Penilaian dari Kemenpan RB	2,60	3,23	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 2</b>				<b>100%</b>
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa	Jumlah Desa Terlayani Informasi dan Komunikasi	159 Desa (Tahun 2019; 79 Desa, Tahun 2020; 80 Desa)	135 Desa (Tahun 2019; 87 Desa, Tahun 2020; 48 Desa)	84,90%
<b>Capaian Sasaran Strategis 3</b>				<b>84,90%</b>
4. Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan OPD Pemprov Kalbar	Persentase Informasi dan Komunikasi yang diamankan	50%	100%	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 4</b>				<b>100%</b>
5. Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektorial	Jumlah OPD yang Data Statistik Sektorialnya Terintegrasi	80%	95,74%	100%
<b>Capaian Sasaran Strategis 5</b>				<b>100%</b>
<b>Capaian Sasaran Strategis Seluruhnya</b>				<b>92.98%</b>



### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu dilakukan pembinaan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya teknologi informasi dan komunikasi oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga perlu dilakukan inovasi secara terus menerus.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Belum terintegrasinya seluruh data statistik Kalimantan Barat secara optimal dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat.

### **2.4 Review Rancangan Awal RKPD**

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2022, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32.210.760.455,00. Adapun rincian Rancangan awal Rencana Kerja tersebut terlampir dalam lampiran I.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar telah melaksanakan Forum OPD yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2021 yang didalamnya telah turut juga mengundang unsur Perangkat Daerah, Bappeda dan masyarakat. Setiap masukan dan kritik serta saran yang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar akan diakomodir dan ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

#### Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) disusun untuk melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, agar RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. *Major Project* menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya.

Pendanaan Proyek Prioritas Strategis ini dengan mengintegrasikan antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Adapun Major Project pada urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yaitu sebagai berikut :

**Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)**

**RPJMN 2020-2024**

<b>No.</b>	<b>Major Project</b>	<b>Manfaat Proyek</b>	<b>Pelaksana</b>
1.	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkurangnya kesenjangan digital</li><li>• Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan</li></ul>	KEMEN KOMINFO
2.	Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menurunnya insiden serangan siber;</li><li>• Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar <i>stakeholder</i> terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).</li></ul>	BSSN

Transformasi Digital, pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan Big Data.

Peran TIK menjadi semakin besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur TIK perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, Selanjutnya untuk mendorong pelayanan dasar dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, infrastruktur TIK perlu diperluas agar menjangkau seluruh daerah dan seluruh kelompok masyarakat. Peningkatan keandalan dan kecepatan pelayanan informasi

memerlukan perluasan jaringan tetap pitalebar (*fixed broadband*) dan jaringan bergerak pitalebar (*mobile broadband*).

Jaringan tetap pitalebar perlu diperluas hingga menjangkau kecamatan sementara akses telekomunikasi dan internet melalui jaringan pitalebar perlu diperluas hingga seluruh desa. Saat ini masih terdapat 7.971 desa belum terlayani akses telekomunikasi dan internet karena tantangan geografis seperti daerah pegunungan dan daerah terpencil. Perluasan jaringan tetap pitalebar dan jaringan bergerak pitalebar akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Di samping itu, migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan kualitas penyiaran khususnya televisi. Digitalisasi penyiaran akan memberikan ruang pemanfaatan spektrum frekuensi untuk kebutuhan penggunaan lain (*digital dividend*).

Selanjutnya terkait Dinamika Ancaman Siber, penguasaan teknologi dan akses terhadap internet yang signifikan berimplikasi pada potensi ancaman siber. Jumlah serangan siber berbentuk *malware* yang sangat tinggi ke Indonesia merupakan cerminan dari dinamika ancaman keamanan nasional yang terus meningkat. Ancaman tersebut semakin serius karena regulasi, infrastruktur, dan SDM.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi". Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, yang harus

bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing-masing, yaitu :

**Tabel 3.2  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja  
Tahun 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pempov Kalbar	predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 90 -100
	Mengoptimalkan Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah	nilai SPBE pemerintah daerah	2,60 - 3,50
	Meningkatkan jumlah data set statistik sektoral yang terintegrasi	jumlah data set statistik yang terintegrasi	5.200
	Meningkatkan kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	36% - 50%

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

- I. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
  - a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- 1) Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator yang ingin dicapai yaitu :

- a. Terlaksananya Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022-2025

Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau usulan masyarakat melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan secara terbuka. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan Masa Jabatan Anggota KPI Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2019–2022 akan segera berakhir, maka perlu dilaksanakan proses penerimaan dan seleksi calon anggota KPID Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Hal tersebut dilakukan agar tugas pokok dan fungsi KPID dalam pengawasan di daerah dapat terus dan berkesinambungan melalui fasilitasi dan pembiayaan dari Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Barat.

- b. Terlaksananya seleksi anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 – 2025

Sesuai Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia disebutkan, Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur. Maka dari itu perlu dilaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah dan janji 7 (tujuh) anggota komisioner KPID terpilih yang diperoleh melalui proses penerimaan dan seleksi calon komisioner KPID periode 2022-2025.

- c. Terlaksananya operasional Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melalui Hibah

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Di Tahun 2022 KPID Prov. Kalbar mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.

- 2) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yang ingin dicapai yaitu :

- a. Komisi Informasi Prov. Kalbar yang mendapatkan hibah

Keberadaan Komisi Informasi adalah salah satu amanat Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008



tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi. Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Prov. Kalbar mendapatkan dana Hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.

3) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yang ingin dicapai yaitu :

- a. Inventarisasi dan dokumentasi 400 opini dan aspirasi publik di media massa. Opini publik merupakan suara dari sekelompok orang yang bersifat umum menjadi permasalahan bersama. Permasalahan tersebut menjadi perhatian bersama ketika sebagian besar masyarakat merasakan hal yang sama atau apa yang menjadi masalah sekelompok orang juga harus menjadi tanggung jawab yang perlu untuk diatasi dan ditemukan solusinya. Media massa dan berita online merupakan sarana yang mampu memasuki segala aspek kehidupan umat manusia. Akan tetapi dengan semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi di era ini, kemudian membuat peran dari media pun meluas. Media Massa dan berita online tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat namun juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Media massa dan berita online kemudian memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi suatu kebijakan pembangunan daerah melalui penyampaian pesan/informasi kepada publik.

Piers Robinson (2012) mengatakan bahwa pada dasarnya kondisi real saat ini, dengan luasnya informasi yang dimiliki membuat media massa menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi paradigma, perspektif dan opini masyarakat (publik). Berdasarkan hasil pemantauan terhadap media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat, isu-isu yang perlu kiranya mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh komponen bangsa diangkat dan didiskusikan lewat kegiatan komunikasi timbal balik. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan akan dapat dilakukan pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik

#### 4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 5 indikator yang ingin dicapai yaitu :

- a. Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada Badan Publik 45 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota.

Pelaksanaan sub kegiatan ini adalah agar terbentuk PPID Utama dan PPID Pembantu di 45 OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkompeten dan siap dinilai dalam Keterbukaan Informasi Publik dimana data, informasi potensi dan berita Pembangunan Pemerintah Provinsi, dapat tersaji melalui website resmi Pemerintah Provinsi dan website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sasaran dari kegiatan ini adalah

seluruh Badan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah dimonitoring dan dievaluasi dalam rangka persiapan penilaian keterbukaan informasi publik.

b. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan salah satu kewajiban yang harus disampaikan Kepala Daerah baik karena kedudukannya sebagai pimpinan Pemerintahan dalam sistem administrasi negara Pemerintah Republik Indonesia maupun sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi terkait telah berakhirnya tahun anggaran.

Oleh sebab itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu meningkatkan pelayanan informasi dan komunikasi publik serta penyebarluasan informasi, maka dibuatlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk infografis yang kemudian dipublikasikan di media cetak dan/atau elektronik.

c. Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat

Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Pembangunan Kalimantan Barat adalah tersedianya materi informasi dalam bentuk foto, video serta data materi berita yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kegiatan pembangunan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Terselenggaranya peliputan dan pendokumentasian Pembangunan Kalimantan Barat dengan target kinerja menghasilkan 220 berita dalam 1 tahun. Dengan dilaksanakannya peliputan diharapkan mampu menyampaikan pesan dan kebijakan pemerintah termasuk mengupayakan arah informasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan pendapat umum, agar terjadi kesamaan visi, misi, dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah, sehingga akan memunculkan *goodwill* (kemauan baik) dari masyarakat, untuk dapat sejalan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, mampu mengemas informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proporsional, dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat.

d. **Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner KI Prov Kalbar periode 2022-2026**

Seiring berakhirnya masa jabatan Komisioner KI Prov Kalbar periode 2018-2022, maka perlu dilaksanakan kegiatan Penerimaan dan Seleksi calon komisioner KI prov kalbar untuk periode 2022-2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik non Pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, karena KI dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya. Selain itu, bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara, mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik agar tugas pokok dan fungsi KI dalam pengawasan di daerah dapat terus dan berkesinambungan melalui fasilitasi dan pembiayaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

e. Pelantikan Anggota Komisioner KI

Sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka perlu dilaksanakan acara pelantikan/pengambilan sumpah dan janji 5 (lima) anggota komisioner KI terpilih yang diperoleh melalui proses penerimaan dan seleksi calon komisioner KI periode 2022-2026.

5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memiliki komitmen dan perencanaan komprehensif untuk membangun e-Government di Kalimantan Barat melalui "KALBAR GO DIGITAL", sebagai inovasi Kalimantan Barat menuju Smart Province dan Transformasi Masyarakat Digital. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut yaitu mendorong terbentuknya Kampung Media.

Kampung Media merupakan program penyebaran informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal

informasi, berita dan jurnalisme. Sebuah media online yang berlandaskan kekuatan jurnalisme warga, yang menampung konten yang dapat diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media.

Dalam upaya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Barat serta meningkatkan kreatifitas KIM, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat se Kalimantan Barat terkait Kampung Media demi menuju “KALBAR GO DIGITAL”.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :
- a. Tersedianya Informasi Publik melalui Media Sosial sebanyak 2256 postingan

Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarkan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan media sosial diawali dengan pengertian dan pemahaman yang lengkap, pengaturan yang tepat, serta pengelolaan yang baik akan diperoleh manfaat dari penggunaan media sosial di instansi pemerintah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait program dan kebijakan pemerintah. Maksud penyelenggaraan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik yaitu sebagai sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika.

Tujuan pelaksanaan Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Komunikasi Publik adalah pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*), strategi komunikasi, manajemen perubahan (*change management*), manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dan penataan tata laksana (*business process*).

- b. Terselenggaranya Pengelolaan Website <http://kalbarprov.go.id> sebanyak 500 postingan

Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan data) yang dilengkapi dengan kanal-kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data, elemen proses dari sistem informasi adalah mengumpulkan data, mengolah data dan menyebarkan informasi. Dalam sistem informasi data, informasi atau pengetahuan mengalir dibawa oleh dokumen atau media komunikasi elektronik seperti telephone atau jaringan komputer. Syarat-syarat terbentuknya sistem informasi berbasis web adalah :

- 1) Tersedianya web server baik statis maupun dinamis.

- 2) Tersedianya software pemrograman web berbaris server jika ingin membuat web;
- 3) Tersedianya database.

Dalam upaya membangun jaringan informasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara teknis bertanggung jawab terhadap pengelolaan web portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan utama adalah untuk menyediakan berita/informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi web yang diimplementasikan maupun pemutakhiran informasi/berita.

7) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemprov. Kalbar kepada Masyarakat dalam 7 publikasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa cetak dalam bentuk liputan khusus (advertorial) dan even by order dengan mengangkat isu aktual sesuai dengan tujuan yang telah



digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Prov. Kalbar. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat melalui publikasi Kegiatan Pemerintahan secara Periodik guna membangun citra positif pemerintah di masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas informasi pembangunan kepada masyarakat dalam mengimbangi pemberitaan media yang cenderung melemahkan wibawa pemerintah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

8) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Peningkatan kapasitas SDM di bidang Komunikasi Publik sebanyak 225 peserta ASN di lingkungan Pemprov Kalbar. Masih minimnya SDM di kalangan ASN yang handal dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik dan *broadcasting* dalam rangka mengelola informasi mengenai program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengakibatkan informasi mengenai program-program pembangunan tidak tersampaikan atau tersosialisasikan kepada masyarakat dengan maksimal. Hal ini salah satunya disebabkan masih minimnya pengetahuan tentang jurnalistik dan *broadcasting* ASN yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi publik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berusaha

untuk meningkatkan SDM di kalangan ASN bidang komunikasi dan informasi publik melalui Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan *Broadcasting* bagi ASN dan Media Lokal tersebut. Maksud dari Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan *Broadcasting* kemampuan ASN dalam hal meliput dan menulis berita dan informasi publik tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tujuan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik dan *Broadcasting* adalah meningkatkan kualitas SDM ASN yang bertugas di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

- b. Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar melalui pelaksanaan 1 kali rapat koordinasi.

Kerjasama humas pemerintah dalam menyebarluaskan kinerja dan capaian merupakan hal yang penting. Masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah secara langsung sehingga akan menimbulkan respon positif. Peran Bakohumas sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi penyebaran informasi dan sinergi antar instansi pemerintah dan lembaga dan partisipasi aktif dari seluruh anggota Bakohumas dan dukungan masyarakat merupakan hal yang harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, Kegiatan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Teknis Kehumasan Pemkab/Kota se-Kalbar dianggap sebagai wadah untuk menyampaikan informasi atau public relation dalam kaitannya dengan strategi kegiatan Pemprov. Kalbar untuk disampaikan kepada masyarakat luas.

9) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Literasi Media

Maksud penyelenggaraan Literasi adalah untuk mendidik masyarakat agar mampu menggunakan media secara cerdas dan kritis. Seorang yang melek media kemudian menjadi seseorang yang mampu untuk membaca, memahami, mengevaluasi, menyeleksi dan mengkritik isi dari pesan-pesan media. Tujuan pelaksanaan literasi adalah meningkatkan pemahaman akan literasi digital dan meningkatkan penyebaran konten-konten positif oleh masyarakat sipil, pemerintah, dan media.

Terlaksananya literasi peraturan ITE sehingga media dan masyarakat lebih memahami pentingnya Peraturan ITE. Kegiatan Literasi Media menjadi sangat penting dalam rangka menyikapi kondisi media penyiaran yang memiliki kemampuan menembus ruang-ruang pribadi dan keluarga. Daya penetrasi ini juga dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk karakter. Sehingga masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik dalam proses mengkonsumsi media penyiaran, terutama televisi. Kemampuan memilih dan memilah tayangan yang bermanfaat secara bijak dan benar merupakan tujuan utama dari kegiatan Literasi Media.

II. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Persentase domain dan subdomain terlayani dengan target kinerja 100%.

Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer ataupun internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2015 mengenai Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, pada pasal 4, bahwa setiap instansi termasuk instansi pemerintah daerah wajib menggunakan dan mendaftarkan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mendaftarkan nama domain yaitu kalbarprov.go.id setiap tahunnya agar domain yang dimiliki tetap aktif.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Kalbar menyediakan layanan subdomain yang dibutuhkan instansi lain dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Layanan subdomain yang dimaksud berupa layanan website dan aplikasi yang membutuhkan domain kalbarprov.go.id, layanan

surat elektronik (email) Pemprov Kalbar, layanan cloud (berbagi pakai), dan yang lainnya. Setiap tahunnya diharapkan semua permintaan layanan nama domain dan subdomain dapat tercapai sebesar 100% dimana semua permintaan dari instansi di lingkungan Pemprov Kalbar dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik.

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 output yang ingin dicapai yaitu :

- a) Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 40 OPD.

Kegiatan Perluasan Jaringan Intranet Pemprov. Kalbar dilakukan dengan membangun jaringan intranet yang menghubungkan 40 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, memasang perangkat jaringan pada titik/PC yang belum terhubung, melakukan monitoring jaringan yang telah terpasang secara *realtime* serta melakukan evaluasi terhadap masalah yang terjadi pada jaringan.

Pemasangan perangkat jaringan, pelaksanaan kegiatan didahului dengan permintaan akses pada computer pengguna (PC client) yang belum terkoneksi dengan jaringan WAN melalui surat permintaan pemasangan jaringan baru. Permintaan tersebut kemudian diproses pada Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah itu dilakukan survey lokasi/titik pemasangan untuk menentukan kebutuhan perangkat. Kemudian dilakukan pemasangan dan

pengaturan perangkat jaringan oleh Pengelola Sistem dan Jaringan.

Pemasangan & pemeliharaan backbone, melaksanakan pemeliharaan dan evaluasi jaringan backbone. Jika dibutuhkan penggantian alat/revitalisasi perangkat berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan teknologi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sepanjang tahun, dengan melakukan pencatatan terhadap gangguan/kendala di pihak pengguna dan solusi yang dilaksanakan.

- b) Tersedianya akses internet kantor di lingkungan Pemprov. Kalbar yang berada di Kota Pontianak.

Maksud dari kegiatan Pengelolaan Akses Internet adalah guna mengakomodir kebutuhan akses internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar, serta untuk memfasilitasi kebutuhan akses internet server Pemprov. Kalbar agar dapat diakses oleh publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan akses internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga bertanggung jawab terhadap akses server Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditempatkan pada ruang *Data Centre* pada DinasKominform Prov. Kalbar, Jl. Adisucipto No. 50 Pontianak. Layanan yang telah dilakukan selama ini perlu dilakukan peningkatan setiap tahunnya baik dari sisi teknologi yang digunakan maupun besaran kapasitas layanan. Peningkatan

layanan tersebut salah satunya diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan Penyediaan Akses Internet.

b) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja jumlah layanan dasar SPBE sebanyak 4 layanan yaitu hosting, email, sub domain, datacloud. Beberapa layanan SPBE yang dikelola oleh Diskominfo antara lain adalah Pengelolaan Domain dan Subdomain Pemprov. Kalbar, Pengelolaan Email, Pengelolaan Web Hosting, serta Pengelolaan Data Cloud (*Storage Cloud*) untuk seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kalbar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan e-Government dalam rangka mendukung Reformasi Birokasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

2) Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Peraturan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov Kalbar

Tersedianya peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar sebanyak 1 Peraturan Gubernur. Pedoman mengenai Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut berisi rencana induk penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Masterplan tersebut adalah berisi rencana secara umum. Untuk selanjutnya, diperlukan peraturan/pedoman turunan yang membahas lebih detail mengenai pengelolaan TIK di OPD Pemprov. Kalbar, diantaranya yang utama adalah pedoman standardisasi struktur data sebagai landasan pembuatan aplikasi yg terintegrasi dan satu data Kalimantan Barat.

Penyusunan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov. Kalbar dimaksudkan untuk mendukung proses penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tertib dan optimal. Mengakomodir proses penyusunan pedoman tata kelola SPBE Pemprov. Kalbar sebagai landasan implementasi TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang mengatur mengenai perencanaan dan manajemen TIK untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar sesuai dengan arah kebijakan dan pembangunan. Selanjutnya berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan pada semua lini dan aspek pemerintahan berbasis e-government.



3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Server yang dikelola di Pusat Data Pemprov kalbar

Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar yaitu 18 unit server. Pusat Data / *Data Centre* adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan untuk menempatkan sistem dan komponen-komponen server, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Data center juga berfungsi sebagai *principal repositories* untuk segala macam peralatan IT, termasuk server, subsistem penyimpanan, *networking switches*, *router* dan *firewall*, serta pemasangan kabel dan *physical racks* yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. *Data Centre* merupakan pusat penyimpanan dan pemrosesan data secara fisik dimana aplikasi menjalankan proses untuk dapat diakses oleh pengguna/*users*. Guna menjamin kelancaran akses pada aplikasi yang dijalankan atau data yang disimpan, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya listrik yang tidak terganggu, keamanan ruang penyimpanan server, kecepatan pemrosesan dan penyimpanan data, akses internet yang memadai dan tanpa gangguan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab terhadap pengelolaan data center sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data-data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Data center yang ada saat ini digunakan untuk media penyimpanan server,

manajemen dan pengelolaan, hingga penyebaran data dan informasi. Saat ini, Diskominfo Prov. Kalbar mengelola 16 unit server dan 11 server *collocation* (server dari OPD lain yang dititipkan/menggunakan akses pada ruang server Pemprov. Kalbar). Server-server ini digunakan untuk mendukung layanan SPBE Pemprov. Kalbar diantaranya adalah layanan subdomain, hosting web dan aplikasi, datacloud/cloud storage pemprov, email serta layanan video conference dan melayani aplikasi dan web dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Layanan-layanan tersebut membutuhkan tempat penyimpanan data yang aman, handal dan minim gangguan.

4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Server yang dikelola di Pusat Data Pemprov kalbar

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, virtual meeting semakin banyak digunakan untuk mempertemukan orang-orang di berbagai lokasi sehingga dapat bertemu secara virtual dan melakukan kegiatan. Virtual meeting telah menjadi media yang semakin populer dan dapat diterima untuk mengembangkan dan menjangkau audiens yang lebih besar, pemerintah daerah khususnya provinsi Kalimantan barat telah menyadari bahwa mengadakan konferensi secara virtual jauh lebih murah daripada acara tatap muka.

Virtual meeting memungkinkan peserta dari jarak jauh untuk mengakses pertemuan dan acara langsung dari tempat masing-masing menggunakan computer atau perangkat lainnya, dapat diselenggarakan sepenuhnya melalui internet atau jaringan telpon dimana peserta tidak perlu berkumpul di ruangan fisik yang sama. Selain acara langsung, virtual meeting mencakup forum diskusi, pusat sumber konferensi, kemampuan untuk mencari dan mengobrol dengan peserta konferensi lainnya dan fitur lainnya. Semua ini dirancang khusus untuk memberikan kesempatan yang sama kepada peserta virtual untuk mendapatkan pengalaman rapat yang sama dengan peserta ditempat.

Dengan banyaknya virtual meeting yang telah diselenggarakan dengan baik dan sukses, membuat banyak pihak khususnya Diskominfo provinsi Kalimantan barat percaya bahwa format ini akan terus dilakukan. Di masa mendatang meskipun pandemi telah berlalu, konsep virtual meeting akan tetap menjadi pilihan, karena mampu menghadirkan peserta dengan geografis yang lebih luas serta dengan biaya yang jauh lebih murah.

5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat Data 5 kabupaten. Kementerian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) mempunyai program untuk pembangunan akses telekomunikasi pada daerah 3T. Setiap tahunnya, diperlukan data mengenai infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T yang mencakup usulan daerah yang akan dibutuhkan pembangunan akses telekomunikasi serta kondisi infrastruktur eksisting. Daftar lokasi pembangunan diusulkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan memperkuat usulan ke Kementerian/Lembaga terkait. Data eksisting berupa kondisi keberadaan tower telekomunikasi serta status berfungsi atau tidaknya sarana dimaksud dengan menyertakan kendala serta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Kegiatan Identifikasi sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan pemerataan pembangunan di bidang telekomunikasi yang di arahkan pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi yakni 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), daerah perbatasan, daerah rintisan dan daerah yang tidak layak secara ekonomis serta wilayah yang belum terjangkau akses dan layanan telekomunikasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan gambaran perkembangan pembangunan infrastruktur KPU USO di Kalimantan Barat. Mengatasi kesenjangan digital sehingga masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar dapat menikmati akses

komunikasi dan telekomunikasi dengan mudah dan pemerataan pembangunan telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat.

6) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan adalah 9 aplikasi yaitu Aplikasi dan Sosialisasi Gencil, Aplikasi Dashboard Karhutla, Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE, Aplikasi Mobile Presensi, Pengembangan Aplikasi E-Activity, Pengembangan Aplikasi Kapuas, Pengembangan Dashboard Desa, Portal Aplikasi Kalbar dan Web Galeri SOP Provinsi Kalbar.

. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung pengembangan aplikasi perkantoran atau pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi adalah untuk mengakomodir pembuatan aplikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan memperbarui/mengembangkan portal web resmi/aplikasi berbasis web online Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang meliputi proses analisis kebutuhan, perancangan sistem dan database, serta pengkodean dan ujicoba aplikasi. Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan antara lain dapat berupa portal web Pemprov, web OPD atau aplikasi

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun pelaksanaan pembuatan aplikasi tersebut adalah menggunakan jasa penyedia dengan metode pengadaan langsung.

- b. Jumlah video yang dibuat yaitu video promosi qriya dan video workshop data

Pembuatan video dimaksudkan untuk mendukung dan mempermudah dalam memberikan informasi kepada masyarakat Pemerintah Provinsi Kalimantan barat. Pembuatan video ini bertujuan sebagai media perkenalan yang berupa memberi informasi kepada audience tentang bisnis/kegiatan/data yang sedang berjalan, serta tutorial yang audience harus lakukan untuk memperoleh produk/layanan dan fungsi lainnya. Pembuatan video dimaksud untuk mempermudah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menunjukkan kualitas produk atau layanan jasa yang diberikan, memperluas jangkauan dalamnya hanya menampilkan dan menyebarkan video yang dimiliki ke berbagai macam platform yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Pengelolaan sistem penghubung layanan elektronik pemerintah 1 sistem penghubung. Integrasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendukung proses integrasi sistem informasi dalam rangka efisiensi proses bisnis dan meminimalisir duplikasi dan inkonsistensi

data. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Integrasi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- untuk mengakomodir proses pengintegrasian sistem informasi yang melibatkan berbagai pihak dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- untuk mempersingkat alur birokrasi dan proses bisnis terutama dalam hal pelayanan publik dan administrasi perkantoran dengan sistem berbagi pakai data/informasi.

sebagai tindak lanjut dari Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemprov Kalbar dan KPK tanggal 8 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Pj. Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati & Walikota serta ketua DPRD Kab/Kota Se-Kalbar. Pimpinan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN melalui program pemberantasan korupsi terintegrasi, melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

8) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Sub kegiatan dengan target kinerja jumlah laporan pengoperasian ruang command center dalam mendukung provinsi cerdas sebanyak 12 laporan setahun.

Command center merupakan salah satu fasilitas dengan infrastruktur lengkap yang disiapkan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berada disebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang gubernur selaku Kepala Daerah bersama-sama tim melakukan meeting, membahas pengambilan keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh Tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain: tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan dan langkah penyediaan informasi publik.

Tujuan dari command centers adalah mengumpulkan dan memproses informasi yang dibutuhkan agar dapat memmanage atau mengatur berbagai kejadian dan kesadaran situasional secara cepat dan efektif serta dokumentasi yang bertujuan sebagai amunisi payung hukum dan cost-recovery. Berbagai dokumentasi mengenai informasi yang diterima dan responnya digunakan sebagai :

1. Perencanaan
2. Aksi tanggap
3. Penggunaan sumberdaya
4. Timeline aktivitas
5. Catatan pembiayaan operasional
6. Penugasan staf penanganan peristiwa/kejadian
7. Catatan detail peristiwa/kejadian



9) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

a. Terlaksananya Workshop dan Sosialisasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan teknologi informasi, khususnya dalam hal penggunaan aplikasi dan layanan pemerintahan harus disosialisasikan kepada pengguna, khususnya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Guna mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Diskominfo Provinsi Kalimantan barat perlu menyelenggarakan workshop dan Sosialisasi terkait implementasi SPBE di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang targetnya adalah terselenggaranya kegiatan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, kolaboratif dan dapat diukur dengan jelas.

Kegiatan workshop dan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman dan terus belajar serta terlibat secara aktif dalam mengimplementasikan SPBE dalam kegiatan pemerintahan, karena ini merupakan potret pemerintahan seberapa jauh kinerja pemerintah, dari workshop dan sosialisasi ini diharapkan dapat mengukur seberapa jauh implementasi SPBE serta kekuatannya sehingga pemerintah provinsi Kalimantan barat juga dapat mengambil Langkah strategis untuk memperbaikinya.

10) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator yang target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Terlaksananya pengelolaan TIK di lingkungan Pemprov Kalbar pada 40 OPD. Kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi menyeluruh tentang sejauh mana penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian dapat dijadikan dasar pengembangan TIK di masa yang akan datang. Tujuan dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi Sistem Informasi adalah agar didapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh tentang pemanfaatan teknologi informasi di OPD agar identifikasi dapat dilaksanakan langsung di lapangan berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari OPD.

Beberapa pengujian teknis perlu dilakukan di lapangan untuk memvalidasi kualitas layanan TIK yang terdapat di setiap OPD, terutama yang berlokasi di dalam kota. Kegiatan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan untuk melakukan inventarisasi aplikasi, infrastruktur dan tata kelola TIK secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, sehingga kemudian dapat meningkatkan performa ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi setiap OPD. Kegiatan tersebut akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan e-Government di Kalimantan Barat sekaligus mendukung Reformasi Birokrasi Publik melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan berbasis TIK.

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral 46 data OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengolahan data sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat. Angka-angka yang diperoleh melalui proses pengumpulan data harus diolah secara kuantitatif. Data mentah yang telah dikumpulkan dari seluruh OPD perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok dan diadakan kategorisasi sehingga menjadi data set yang pada tahap selanjutnya akan dianalisis dan dipublikasikan.

b. Terlaksananya analisis data statistik sektoral 46 data OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Analisis Data Statistik Sektoral adalah tugas dan fungsi seksi analisis data statistik yang ada di Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk menganalisis data-data sektoral sebelum diolah sebelum disajikan sebagai informasi publik. Analisis Data Statistik Sektoral sebagai wali data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menganalisis

terdahulu data-data yang ada sebagai rekomendasi selanjutnya dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Tersedianya Buku Kalimantan Barat Dalam Angka sebanyak 20 buku.

Pencetakan Buku Kalbar Dalam Angka (KDA) dilakukan setiap tahun yang bekerjasama dengan BPS Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan statistik dasat sektoral dan khusus. Pencetakan Buku Kalbar Dalam Angka (KDA) digandakan untuk kepentingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai kepentingan informasi perencanaan pembangunan.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi adalah sub kegiatan dimana melatih dan membimbing SDM pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya di bidang statistik sektoral. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten/Kota di bidang statistik sektoral sehingga dapat menunjang dan meningkatkan mutu statistik di masing-masing daerah. Jumlah SDM yang akan dilatih meningkatkan

kemampuannya di Bidang Statistik Sektoral dengan target 61 orang.

3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

- a. Tersusunnya Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 25 buku.

Membangun Meta Data adalah hal yang penting dan mendasar bagi menentukan data-data yang akan diminta dan disepakati bersama-sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria agar bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Metadata adalah dimana data-data disampaikan/diproduksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk disusun standar data, jenis data dan metadatanya untuk menyusun informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku guna menggambarkan data dan menjelaskan tentang data.

**IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

1) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 1 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi menargetkan 1 (satu) Produk Hukum Daerah di Bidang Persandian, yaitu Pedoman Pola Komunikasi Sandi, sebagai payung hukum penyelenggaraan urusan Persandian dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 3 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. Menyelenggarakan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah di Kabupaten / Kota

Dalam rangka membangun kesamaan pemahaman terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah perlu untuk meningkatkan kesadaran pengamanan Informasi milik Pemerintah serta membangun kesamaan pemahaman tentang Security awareness. Meningkatkan layanan kebijakan Persandian dan keamanan Informasi, berupa inventarisasi data atau informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal dalam Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi dapat diidentifikasi bahwa tugas dan fungsi serta kewenangan persandian meliputi penyelenggaraan keamanan informasi rahasia pada transmisi (informasi security) dan penyelenggaraan intelijen sinyal (signal intelligent) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Terbentuk dan beroperasinya 1 Tim CISRT yang beroperasi selama 1 tahun

Bidang Persandian dan Statistik Memiliki Tugas untuk Mengelola Insiden Keamanan Informasi di dalam wadah layanan SOC (Security Operation Center). **Insiden Keamanan Informasi** adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem komputer, seperti serangan virus, akses ilegal, kebocoran informasi, serangan DDOS, dan lain sebagainya. **CSIRT (Computer Security Incident Response Team)** adalah sebuah Tim yang dibentuk untuk merespon insiden keamanan informasi yang terjadi pada konstituennya. Tujuan utama dari respon / tanggapan terhadap insiden adalah untuk menghentikan insiden agar tidak menyebar serta agar sistem yang terinfeksi dapat beroperasi secara normal. Latar belakang terbentuknya CISRT adalah banyaknya insiden (*spam, malware, deface, phishing*) terhadap aset TIK instansi pemerintah. Tujuannya untuk mengamankan dan mengurangi insiden keamanan informasi di jajaran Perangkat Daerah Pemrov Kalimantan Barat.

- c. Terselenggaranya Pejabat dan ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik

Definisi Tanda Tangan Elektronik menurut UU ITE dan PP adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas id digital, keutuhan dan keaslian. Landasan Hukum TTE yang tertuang dalam UU ITE Pasal 11 yaitu Tanda Tangan Elektronik memiliki

kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. UU ITE Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

b) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi

3) Sub Kegiatan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 2 indikator dengan target yang ingin dicapai yaitu :

a. OPD Penggunaan Layanan email dan Persandian/ Sanapati Perangkat Daerah dengan target 47 email sanapati opd

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi dan terbentuknya Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Perlunya meningkatkan pengamanan informasi khususnya dalam sarana komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, salah satunya dengan *email* Sanapati yang merupakan layanan *email* milik BSSN yang bersifat *secure closed group* (tertutup) yang memiliki proteksi terhadap *fake email*, *spam email*, dan *email bombing*.

b. Perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi yaitu 1 perangkat JKS

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Sandi, penyelenggaraan operasional



Sistem Persandian Negara perlu dibangun Jaringan Komunikasi Sandi sebagai sarana utama yang digunakan dalam kegiatan komunikasi Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah.

Jaring Komunikasi Sandi (JKS) memiliki keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian. Gelar Jaringan Komunikasi Sandi adalah kegiatan membangun JKS yang dimulai dari kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1 Indikator Kinerja**

Adapun indikator kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**TABEL : 4.1  
Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
<b>Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	1.	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	90%
	2.	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	100%
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%
	2.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat	8 rekomendasi kebijakan
	3.	Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
	4.	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	75%
	5.	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 media
Sub Kegiatan : Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1.	Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2025	1 Kegiatan
	2.	Jumlah anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2025	7 orang

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

	3.	Jumlah KPID yang mendapat Hibah	1 Komisi
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.	Jumlah KI yang mendapat Hibah	1 Komisi
Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.	Jumlah opini dan aspirasi publik di media massa yang diinventarisir dan didokumentasikan	400 opini
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	1.	Jumlah Badan Publik yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	14 PPID Kab/Kota dan 45 PPID OPD Prov. Kalbar
	2.	Jumlah Infografis RLPPD yang dipublikasikan kepada masyarakat	1 infografis RLPPD
	3.	Jumlah kegiatan Pembangunan Kalimantan Barat yang diliput,	220 Berita
	4.	Jumlah anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2026	5 orang
	5	Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2026	1 Kegiatan
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100%
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.	Jumlah Informasi Publik yang diposting melalui Media Sosial	2256 Postingan
	2.	Jumlah berita dan informasi yang diposting melalui Website <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a>	500 Postingan
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	7 Publikasi
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.	Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitasnya di bidang Komunikasi Publik	225 Peserta
	2.	Jumlah Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar yang dilaksanakan dalam setahun	1 Rakor
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	1.	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam literasi peraturan ITE	150 Peserta
<b>Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	1.	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	76%

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Persentase domain dan subdomain terlayani	100%
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.	Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	40 OPD
	2.	Jumlah akses internet OPD yang terlayani	11 OPD
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Jumlah Layanan Dasar SPBE	4 layanan : hosting, email, sub domain, datacloud
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Jumlah peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar yang disusun	1 Pergub
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	18 unit server
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.	Persentase Virtual Meeting Terlayani	100%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir	Data 5 kabupaten
Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	9 aplikasi
	2.	Jumlah Video yang dibuat	2 video
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.	Jumlah sistem penghubung layanan elektronik pemerintah yang dikelola	1 sistem penghubung

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1.	Jumlah Laporan Pengoperasian Ruang Comand Center Dalam Mendukung Provinsi Cerdas	12 Laporan
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Sosialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	1 kali
	2.	Jumlah Workshop dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	2 kali
Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1.	Jumlah TIK OPD di lingkungan Pemprov Kalbar yang dikelola	40 OPD
<b>Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>1.</b>	<b>Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi</b>	<b>100%</b>
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi	100%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1.	Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihimpun dan diolah	47 data OPD
	2.	Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dianalisis dan didesiminasi	47 data OPD
	3.	Jumlah Buku Kalimantan Barat Dalam Angka yang tersedia	20 buku KDA
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1.	Jumlah SDM di Bidang Statistik yang dilatih	61 orang
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Buku Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun	25 buku
<b>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>1.</b>	<b>Persentase OPD dengan kategori : Baik, Cukup, Perlu Perbaikan dan Tidak Layak</b>	<b>77,12%</b>
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1.	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	100%
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah produk hukum daerah di bidang persandian yang disusun	1 produk hukum daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah	14 Kabupaten / Kota
	2.	Jumlah Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk dan beroperasi	1 Tim CISRT beroperasi untuk 1 tahun
	3.	Jumlah Pejabat dan ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik	150 orang
Sub Kegiatan : Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah OPD Penggunaan Layanan email dan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah	47 email Sanapati OPD
	2.	Jumlah perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi	1 Perangkat JKS

#### 4.2 Kelompok Sasaran

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran dan Lokasi sebagai berikut :

**TABEL : 4.2  
Kegiatan Program Prioritas Tahun 2022  
Berdasarkan Sasaran dan Lokasi Kegiatan**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran	Lokasi
<b>Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
Sub Kegiatan : Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1.	Jumlah anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2025	KPID Prov. Kalbar Pontianak
	2.	Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2025	Anggota KPID Prov. Kalbar Pontianak
	3.	Jumlah KPID yang mendapat Hibah	Masyarakat Pontianak
Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.	Jumlah KI yang mendapat Hibah	Komisi Informasi Prov. Kalbar Pontianak
Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.	Jumlah opini dan aspirasi publik di media massa yang diinventarisir dan didokumentasikan	Masyarakat Pontianak
Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	1.	Jumlah Badan Publik yang sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	OPD Pemprov Kalbar dan PPID Kab/Kota Pontianak
	2.	Jumlah Infografis RLPPD yang dipublikasikan kepada masyarakat	Masyarakat Pontianak
	3.	Jumlah kegiatan Pembangunan Kalimantan Barat yang diliput,	Badan Publik dan Masyarakat Kalimantan Barat, Kab. Sintang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas
	4.	Jumlah anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2026	Anggota Komisioner Komisi Informasi Prov. Kalbar Pontianak
	5.	Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi	Masyarakat Pontianak

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

		Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2026		
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.	Jumlah Informasi Publik yang diposting melalui Media Sosial	Masyarakat	Pontianak
	2.	Jumlah berita dan informasi yang diposting melalui Website <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a>	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	Masyarakat	Pontianak
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	1.	Jumlah SDM yang ditingkatkan Kapasitasnya di bidang Komunikasi Publik	Masyarakat	Pontianak
	2.	Jumlah Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar yang dilaksanakan dalam setahun	14 Kab/Kota	Pontianak
Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media	1.	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam literasi peraturan ITE	Masyarakat dan Media	Pontianak
<b>Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>				
Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				
Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Persentase domain dan subdomain terlayani	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.	Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
	2.	Jumlah akses internet OPD yang terlayani	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Jumlah Layanan Dasar SPBE	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak



**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Jumlah peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar yang disusun	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.	Persentase Virtual Meeting Terlayani	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1.	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir	Masyarakat	Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.	Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
	2.	Jumlah Video yang dibuat	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1.	Jumlah sistem penghubung layanan elektronik pemerintah yang dikelola	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	1.	Jumlah Laporan Pengoperasian Ruang Comand Center Dalam Mendukung Provinsi Cerdas	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Sosialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
	2.	Jumlah Workshop dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1.	Jumlah TIK OPD di lingkungan Pemprov Kalbar yang dikelola	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
<b>Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1.	Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihimpun dan diolah	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
	2.	Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dianalisis dan didesiminasi	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
	3.	Jumlah Buku Kalimantan Barat Dalam Angka yang tersedia	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1.	Jumlah SDM di Bidang Statistik yang dilatih	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Buku Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun	OPD Pemprov Kalbar	Pontianak
<b>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>				
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi				
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah produk hukum daerah di bidang persandian yang disusun	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
	2.	Jumlah Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk dan beroperasi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
	3.	Jumlah Pejabat dan ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
Sub Kegiatan : Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.	Jumlah OPD Penggunaan Layanan email dan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak

**RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

	2.	Jumlah perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi	Aparatur Pemerintah Prov. Kalbar	Pontianak
--	----	---	----------------------------------	-----------

#### **4.3 Kebutuhan Pendanaan Indikatif**

Adapun kebutuhan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 32.210.760.455,- (rincian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terdapat pada lampiran).

#### **4.4 Sumber Dana**

Sumber pendanaan yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan pelaksanaan pembangunan melalui program kegiatan dan sub kegiatan dan juga sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tolak ukur capaian kinerja Tahun 2022 dalam mewujudkan target-target kinerja yang telah ditetapkan dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, keberhasilan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat akan menunjang keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan cepat melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Informasi dan Publikasi.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 masih jauh dari kata "sempurna" diharapkan berbagai kritik dan saran bagi perbaikan perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat guna mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi.

Pontianak, September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat



**SAMUEL, SE, M.SI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660408 199303 1 009

## Lampiran I :

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	16						31,640,856,663						32,965,729,857						
2	16	01					11,430,856,647						12,572,441,267						
2	16	01	1.01				530,153,728						583,169,099						
2	16	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Terlaksananya penyusunan dokumen Identifikasi dan Analisis Resiko perangkat Daerah 2. Terlaksananya penyusunan dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Tingkat Nasional, Provinsi danKabupaten Kota 3. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan teknis pada forum SKPD 4. Terlaksananya penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Anggaran Murni dan Perubahan 5. Terlaksananya penyusunan dokumen RENJA Anggaran Murni dan Perubahan 6. Terlaksananya penyusunan laporan SIRUP Anggaran Murni dan Perubahan dan Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa / 1 tahun	1 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan				1 Dokumen 2 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan	182,112,152	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,323,367	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	15,087,032	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	16,595,735	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	14,925,862		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	16,418,448	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan DPA- SKPD	1 Dokumen				1 Dokumen	14,953,102	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	16,448,412	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perubahan DPA SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	15,061,140	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	16,567,254	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Terlaksananya penyusunan dokumen LAKIP 2. Terlaksananya penyusunan dokumen LPPD 3. Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	47,233,845	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	51,957,229	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya penyusunan dokumen laporan e-SAKIP Reviu 2. Terlaksananya penyusunan 12 laporan RFK per bulan / 1 tahun 3. Terlaksananya penyusunan laporan bulanan Realisasi Pengukuran Kinerja / Pengelolaan e-kinerja 4. Tersusunya Laporan Triwulan dan Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (simonev) 5. Terlaksananya penyusunan laporan bulanan TEPR /SIMONTEPRA (Sistem Monitoring Tim Evaluasi/Pengawasan Realisasi Anggaran)	1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 12 Laporan			1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	240,780,595	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 4 Laporan 12 Laporan	264,858,654	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2 16 01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>9,491,588,501</b>						<b>10,440,747,349</b>		
2 16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Diskominfo Prov. Kalbar	12 Bulan			12 Bulan	7,854,066,054	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	8,639,472,659	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Materai dan Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	12 Bulan			12 Bulan	5,000,000	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	5,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan, Barang dan Jasa Kantor	12 Bulan			12 Bulan	1,513,280,160	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	1,664,608,176	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	72,047,708	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Laporan	79,252,478	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya dokumen TLHP	1 Dokumen			1 Dokumen	22,465,120	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	24,711,632	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Semester dan Tahunan SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	24,729,459	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	27,202,404	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2 16 01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>30,020,771</b>						<b>31,521,809</b>		
2 16 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	30,020,771	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	31,521,809	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2 16 01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>191,684,352</b>						<b>210,852,787</b>		
2 16 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Terhadap Pranata Humas/Pranata Komputer dan Terkelolanya dokumen administrasi kepegawaian	12 Bulan			12 Bulan	105,151,641		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	115,666,805	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Bulan			12 Bulan	17,222,121	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Bulan	18,944,333	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Bulan			12 Bulan	23,810,590	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	26,191,649	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	12 Bulan			12 Bulan	20,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	22,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya PNS yang mengikuti sosialisasi	12 Bulan			12 Bulan	12,500,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	13,750,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	12 Bulan			12 Bulan	13,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	14,300,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>393,156,760</b>						<b>432,472,435</b>		
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun			1 Tahun	37,586,660	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Tahun	41,345,326	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			12 Bulan	54,800,711	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	60,280,782	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	12 Bulan			12 Bulan	25,340,521	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	27,874,573	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	12 Bulan			12 Bulan	65,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	71,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			12 Bulan	25,303,250	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	27,833,575	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan	12 Bulan			12 Bulan	6,400,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	7,040,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan			12 Bulan	163,055,700		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	179,361,270	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya Dokumen Arsip	12 Bulan			12 Bulan	15,669,918	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	17,236,909	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2 16 01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>537,797,335</b>						<b>591,577,068</b>		
2 16 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat menyurat	12 Bulan			12 Bulan	612,900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	674,190	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			12 Bulan	223,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Bulan	245,300,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			12 Bulan	21,000,000	Kab. Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Bulan	23,100,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani, Kebersihan Kantor dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik melalui PPID Pembantu di OPD	12 Bulan			12 Bulan	293,184,435	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	322,502,878	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>2 16 01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>256,455,200</b>						<b>282,100,720</b>		
2 16 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan dan Pemeliharaan 5 Kendaraan Dinas Roda 4 dan 5 Kendaraan Dinas Roda 2	12 Bulan			12 Bulan	82,840,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Bulan	91,124,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan AC/ kipas angin , pemeliharaan Komputer, Printer, alat studio dan komunikasi, dan Generator	12 Bulan			12 Bulan	133,615,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	12 Bulan	146,976,720	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Air dan Listrik	12 Bulan			12 Bulan	40,000,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Bulan	44,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>						<b>3,220,000,016</b>							<b>3,403,288,590</b>	
2 16 02 1.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>3,220,000,016</b>							<b>3,403,288,590</b>	
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Inventarisasi dan dokumentasi opini dan aspirasi publik di media massa	400 Opini			400 Opini	71,231,822		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		400 Opini	71,231,822	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1. Tersedianya Infografis RLPPD untuk dipublikasikan kepada masyarakat 2. Publikasi Kegiatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	1 Infografis RLPPD 7 Publikasi Berita			1 Infografis RLPPD 7 Publikasi Berita	143,882,205	Kab. Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Infografis RLPPD 7 Publikasi Berita	158,270,426	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1. Terselenggaranya peliputan dan pendokumentasian Pembangunan Kalimantan Barat 2. Informasi Publik melalui Media Sosial 3. Pengelolaan Website <a href="http://kalbarprov.go.id">http://kalbarprov.go.id</a>	220 Peliputan 2256 Postingan 500 Postingan			220 Peliputan 2256 Postingan 500 Postingan	292,054,911	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				220 Peliputan 2256 Postingan 500 Postingan	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Pembinaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah pada Badan Publik 46 PPID OPD dan 14 PPID Kab/Kota Terlaksananya Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan/Pengambilan Sumpah dan Janji) Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2022-2026 Terselenggaranya Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2022-2026	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	288,732,544		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	317,605,798	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya literasi peraturan ITE sehingga media dan masyarakat lebih memahami pentingnya Peraturan ITE	150 Peserta			150 Peserta	57,642,210	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150 Peserta	63,406,431	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan KPID melalui Hibah 2. Terselenggaranya Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2022-2025 3. Terlaksananya Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan/Pengambilan Sumpah dan Janji) Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2022-2025 4. Rapat Badan Koordinasi Teknis kehumasan 14 Kota se-Kalbar	1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kali Rakor			1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kali Rakor	1,249,388,949	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 Tahun 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kali Rakor	1,364,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Workshop bagi SDM dalam kapasitas pemahaman terhadap Komunikasi Publik 47 OPD dan 14 Kab/Kota	1 kegiatan			1 kegiatan	59,471,135	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1 kegiatan	65,418,249	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan KI Melalui Hibah	1 Tahun			1 Tahun	1,000,000,000		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Tahun	1,000,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Pembinaan KIM Tingkat Provinsi Kalbar	1 Kali Pertemuan KIM			1 Kali Pertemuan KIM	57,596,240		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Kali Pertemuan KIM	63,355,864	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>						<b>16,990,000,000</b>							<b>16,990,000,000</b>	
2 16 03 1.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>8,495,405,900</b>							<b>8,495,405,900</b>	
2 16 03 1.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Domain dan Subdomain yang Terlayani	100 %			100 %	132,474,200	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 %	132,474,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Jumlah OPD yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemprov Kalbar 2. Jumlah OPD yang disediakan akses internetnya	40 OPD 11 OPD			40 OPD 11 OPD	8,362,931,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 OPD 11 OPD	8,362,931,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.02	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>						<b>8,494,594,100</b>							<b>8,494,594,100</b>	
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Dasar SPBE	4 Jenis Layanan			4 Jenis Layanan	64,331,300	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Jenis Layanan	64,331,300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 1.02 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Kebijakan/Peraturan Pedoman Tata Kelola SPBE Pemprov Kalbar	2 Dokumen			2 Dokumen	41,266,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	41,266,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	18 Unit			18 Unit	6,052,285,400	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18 Unit	6,052,285,400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Virtual Meeting Terlayani	100 %			100 %	192,346,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 %	192,346,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat	5 Kab/Kota			5 Kab/Kota	60,650,800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bengkayang, Jagoi Babang, Semua Kelurahan Kab. Bengkayang, Monterado, Semua Kelurahan Kab. Bengkayang, Siding, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Embaloh Hulu, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Batang Lupar, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Badau, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Selatan, Semua Kelurahan Kab. Kapuas Hulu, Puring Kencana,	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5 Kab/Kota	60,650,800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
									Semua Kelurahan Kab. Sambas, Paloh, Semua Kelurahan Kab. Sambas, Sajingan Besar, Semua Kelurahan Kab. Sanggau, Sekayam, Semua Kelurahan Kab. Sanggau, Entikong, Semua Kelurahan Kab. Sintang, Ketungau Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sintang, Ketungau Hulu, Semua Kelurahan									
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan Jumlah video yang dibuat	7 Aplikasi 2 Video			7 Aplikasi 2 Video	1,010,011,600	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7 Aplikasi 2 Video	1,010,011,600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Elektronik Pemerintah	1 Sistem			1 Sistem	40,896,000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Sistem	40,896,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Beroperasinya Ruang Command Center	12 Bulan			12 Bulan	866,238,700	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Bulan	866,238,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Sosialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Jumlah Workshop dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	1 Kali 2 Kali			1 Kali 2 Kali	80,996,100	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Kali 2 Kali	80,996,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	1.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah OPD Pengelolaan TIK di Lingkungan Pemprov Kalbar	47 OPD			47 OPD	85,572,100		[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47 OPD	85,572,100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1) Terselenggaranya Kerjasama dengan BSRE Dalam Penerbitan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2) Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah 3) Terbentuk dan beroperasinya Tim Security Operation Center	47 OPD 4 Kab/Kota 1 Tim			47 OPD 4 Kab/Kota 1 Tim	71,276,580	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			47 OPD 4 Kab/Kota 1 Tim	74,840,409	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 21 02 1.02	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>						<b>122,916,645</b>						<b>129,062,477</b>		
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1) Terlaksananya Pembinaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah 2) Tersedia dan beroperasinya layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah	47 OPD 1 Perangkat JKS			47 OPD 1 Perangkat JKS	122,916,645	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		47 OPD 1 Perangkat JKS	129,062,477	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>TOTAL</b>							<b>32,210,760,455</b>						<b>33,582,199,834</b>		



**LAMPIRAN II :**

**REVISI CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR**

Tujuan RPJMD	Indikator	SASARAN RPJMD					RENSTRA										PROGRAM	
		Sasaran RPJMD	Indikator	Target			TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN							KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023					KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan	<b>predikat keterbukaan informasi publik</b>	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	<b>predikat keterbukaan informasi publik</b>	Terseleenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pempov Kalbar	predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PUBLIK
			<b>predikat penilaian SPBE</b>	Baik	baik	sangat baik			Mengoptimalkan Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	2,60	2,60	2,60	2,60-3,50	2,60-3,50	3,50-4,20	3,50-4,20	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			<b>integrasi data statistik sektoral</b>	100%	100%	100%			Meningkatkan jumlah data set statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Dataset Statistik Yang Terintegrasi	1.600	1.600	2.800	4.000	5.200	6.400	20.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
			<b>indeks keamanan informasi</b>	Tingkat 3 / Cukup	Tingkat 4 / Baik	Tingkat 4 / Baik			Meningkatkan kualitas layanan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	15%	30%	50%	36% - 50% (perlu perbaikan)	36% - 50% (perlu perbaikan)	36% - 50% (perlu perbaikan)	36% - 50% (perlu perbaikan)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
									Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

REVISI CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

PROGRAM										KEGIATAN								SUB KEGIATAN								Penanggung jawab											
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							Kondisi Akhir	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					Kondisi Akhir	SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target														
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	2024					Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022					2023	2024	2021		Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.						
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100	60%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan informasi dan pembinaan FPPID lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk FPPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk FPPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Pembinaan dan monitoring pelaksanaan dan penilaian keterbukaan informasi publik	1) Jumlah anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2025 2) Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 - 2025 3) Jumlah KPID yang mendapat Hibah	1) - 2) - 3) 1 Komisi	Rp 1.202.740.679	2022 Rp.	1) 7 orang 2) 1 kegiatan 3) 1 Komisi	Rp 1.323.014.747	2023 Rp.	1) - 2) - 3) 1 Komisi	Rp 1.455.316.222	Seksi Pelayanan Informasi Publik							
																		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase informasi dan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	100%	Rp 224.629.277	100%	Rp 247.092.205	100%	Rp 271.801.425	Seksi Pengelolaan Informasi Publik										
																		Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan di bidang informasi publik	Jumlah peralatan pendukung kegiatan di bidang informasi yang tersedia	/A/	/A/	paket	Rp 800.000.000	paket	Rp 50.000.000	Seksi Pengelolaan Informasi Publik										
																		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Tersusunnya peraturan tingkat daerah di bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah peraturan tingkat daerah di bidang informasi dan komunikasi publik yang tersusun	/A/	/A/	1 produk hukum	Rp 75.000.000	1 produk hukum	Rp 75.000.000	Seksi Pelayanan Informasi Publik										
																		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terselenggaranya dukungan fasilitas dan pendampingan komisi informasi daerah	Jumlah KI yang mendapat Hibah	1 Komisi	Rp 1.000.000.000	1 Komisi	Rp 1.000.000.000	1 Komisi	Rp 1.000.000.000	Seksi Pelayanan Informasi Publik										
																		Terselenggaranya monitoring pemantauan isu dan opini yang berkembang untuk rekomendasi kebijakan kepada pimpinan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat	Jumlah opini dan aspirasi publik di media massa yang diinventarisir dan didokumentasikan	350 opini	Rp 148.285.315	400 opini	Rp 163.113.847	450 opini	Rp 179.425.231	Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik										
																		Terselenggaranya pengelolaan aduan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti	Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya tindak lanjut aduan dari masyarakat melalui layanan online dan offline	1) Jumlah Badan Publik yang sudah menerangkan Keterbukaan Informasi Publik 2) Jumlah Infografis RLPPD yang dipublikasikan kepada masyarakat 3) Jumlah kegiatan Pembangunan Kalimantan Barat yang diliput, didokumentasikan dan dipublikasikan 4) Jumlah anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang dilantik periode 2022 - 2026 5) Jumlah Kegiatan Penerimaan dan Seleksi Calon Komisioner Komisi Informasi Daerah	1) - 2) - 3) - 4) - 5) -	Rp 76.563.096	1) 14 FPPID Kab/Kota dan 45 FPPID OPD Prov. Kalbar 2) 1 infografis RLPPD 3) 240 Berita 4) 5 orang 5) 1 Kegiatan	Rp 462.525.600	1) 14 FPPID Kab/Kota dan 45 FPPID OPD Prov. Kalbar 2) 1 infografis RLPPD 3) 240 Berita 4) 5 orang 5) -	Rp 508.778.160	Seksi Pelayanan Informasi Publik
	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	51,09%	51,09%	60,85%	80%	100%	100%	100%		Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	51%	75%	51%	75%	100%	100%	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100%	Rp 270.766.085	100%	Rp 297.842.694	100%	Rp 327.626.963	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik								

PROGRAM											KEGIATAN						SUB KEGIATAN								Penanggung jawab														
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target																		
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022				2023	Kondisi Akhir	2021	Rp.		2022	Rp.	2023	Rp.										
											Terselenggaranya Pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi Publik melalui Media Sosial dan Website	1) Jumlah Informasi Publik yang diposting melalui Media Sosial 2) Jumlah berita dan informasi yang diposting melalui Website http://kalbarprov.go.id	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp 197.764.409	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp 217.540.850	1) 2256 Postingan 2) 500 Postingan	Rp 239.294.935	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
																				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Masyarakat	6 Publikasi	Rp 130.209.861	7 Publikasi	Rp 143.230.847	8 Publikasi	Rp 157.553.932	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik										
																				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM di bidang Komunikasi Publik	1) Jumlah SDM yang ditingkatkan 2) Jumlah Rapat Badan Koordinasi Teknis Kehumasan 14 Kota se-Kalbar yang dilaksanakan dalam setahun	1) 52 Peserta 2) 2 Rakor	Rp 43.351.291	1) 225 Peserta 2) 1 Rakor	Rp 108.204.000	1) 250 Peserta 2) 4 Rakor	Rp 119.024.400	Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik										
																				Layanan Hubung Media	Terlaksananya layanan hubungan media terkait literasi peraturan ITE untuk media dan masyarakat	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam literasi peraturan ITE	150 Peserta	Rp 176.059.809	150 Peserta	Rp 193.665.790	150 Peserta	Rp 213.032.369	Seksi Layanan Hubungan Media										
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	60%	60%	70%	60%	76%	92%	92%	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase domain dan subdomain terlayani	98%	Rp 45.425.993	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 110.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE										
																				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Intra dan akses internet di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1) Jumlah OPD yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2) Jumlah akses internet OPD yang terlayani	1) 44 OPD 2) 11 OPD	Rp 7.373.929.763	1) 40 OPD 2) 11 OPD	Rp 7.902.140.000	1) 47 OPD 2) 47 OPD	Rp 8.692.354.000	Seksi Infrastruktur TIK										
																				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terselenggaranya penyediaan Nama Domain Pemprov. Kalbar yang terfasilitasi	Persentase Penyediaan Nama Domain Pemprov. Kalbar yang terfasilitasi	N/A	N/A	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 60.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE										
																				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Dasar SPBE	Jumlah Layanan Dasar SPBE	4 layanan : hosting, email, sub domain, datacloud	Rp 55.006.650	4 layanan : Email, hosting, subdomain dan datacloud	Rp 100.000.000	7 layanan : hosting, email, sub domain, datacloud, vidcon, absensi elektronik, collocation	Rp 110.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE
																				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersusunnya pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar yang disusun	Jumlah peraturan pedoman tata kelola SPBE Pemprov Kalbar yang disusun	1 Pergub	Rp 108.692.757	1 Pergub	Rp 50.000.000	1 Pergub	Rp 55.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE										
																				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Workshop / Bimbingan Teknis Jaringan dan Coding dan Sosialisasi Hosting, Email, dan Cloud	1) Jumlah Sosialisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah 2) Jumlah Workshop dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	1) 1 kali 2) 2 kali	Rp 46.279.279	1) 1 kali 2) 2 kali	Rp 74.464.900	1) 1 kali 2) 2 kali	Rp 81.911.390	Seksi Tata Kelola SPBE										
																				Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya pengelolaan TIK di lingkungan Pemprov Kalbar	Jumlah TIK OPD di lingkungan Pemprov Kalbar yang dikelola	47 OPD	Rp 65.030.865	40 OPD	Rp 84.672.100	47 OPD	Rp 110.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE										

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN							Penanggung jawab															
			TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target																
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021		Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.										
																		Pengelolaan Pusat Data Pemprov Kalimantan Daerah	Terkelolanya Server yang dikelola di Pusat Data Pemprov Kalbar	Jumlah server yang dikelola di Pusat Data	19 unit server	Rp. 429.423.688	18 unit server	Rp. 479.280.400	30 unit server	Rp. 3.000.000.000	Seksi Infrastruktur TIK												
																	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1) Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan 2) Jumlah Video yang dibuat	1) 5 aplikasi 2) -	Rp. 332.934.013	1) 9 aplikasi 2) 2 video	Rp. 1.160.287.500	1) 10 aplikasi 2) 3 video	Rp. 1.300.000.000	Seksi Aplikasi													
																	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terselenggaranya integrasi sistem informasi penghubung layanan pemerintah yang dikelola	Jumlah sistem penghubung layanan elektronik pemerintah yang dikelola	1 sistem penghubung	Rp. 50.408.051	1 sistem penghubung	Rp. 60.000.000	1 sistem penghubung	Rp. 70.000.000	Seksi Aplikasi													
																	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggaranya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan Pengoperasian Ruang Command Center Dalam Mendukung Provinsi Cerdas	12 Laporan	Rp. 703.795.468	12 Laporan	Rp. 1.000.000.000	12 Laporan	Rp. 1.100.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE													
																	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terselenggaranya Pengamanan sistem informasi	Persentase Sistem Informasi Yang Diamankan	N/A	N/A	100%	Rp. 600.000.000	100%	Rp. 300.000.000	Seksi Infrastruktur TIK													
																	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Penilaian Indeks SPBE	Tersusunnya Laporan Penilaian Indeks SPBE	N/A	N/A	1 Laporan	Rp. 60.000.000	1 Laporan	Rp. 70.000.000	Seksi Tata Kelola SPBE													
																	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Persentase Virtual Meeting Terlayani	N/A	N/A	100%	Rp. 107.513.900	100%	Rp. 118.265.290	Seksi Aplikasi													
																	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terselenggaranya Inventarisasi Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika pada wilayah 3T dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat yang diinventarisir	Data 5 kabupaten	Rp. 17.176.725	Data 5 kabupaten	Rp. 60.650.800	Data 14 kabupaten	Rp. 110.000.000	Seksi Infrastruktur TIK													
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	70%	70%	80%	100%	100%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terselenggaranya penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang optimal	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1) Terlaksananya Pengolahan Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dihimpun dan diolah 2) Terlaksananya Analisis Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dianalisis dan didesiminasi 3) Tersedianya Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 4) Tersedianya Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat 5) Tersedianya Buku Daftar Data Prioritas	1) Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun 2) Jumlah Data Statistik Sektoral OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun 3) Jumlah Buku Kalimantan Barat Dalam Angka yang tersedia 4) Jumlah Buku Statistik Sektoral Kalimantan Barat yang tersedia 5) Jumlah Buku Daftar Data Prioritas yang tersedia	1) 47 data OPD 2) 47 data OPD 3) 70 buku KDA 4) 20 buku SS 5) 50 buku DDP	Rp. 225.872.305	1) 47 data OPD 2) 47 data OPD 3) 70 buku KDA 4) 0 buku SS 5) 0 buku DDP	Rp. 248.459.536	1) 47 data OPD 2) 47 data OPD 3) 70 buku KDA 4) 50 buku SS 5) 50 buku DDP	Rp. 273.305.489	1) Seksi Pengelolaan Data Statistik 2) Seksi Analisis Data Statistik 3) Seksi Pengelolaan Data Statistik 4) Seksi Analisis Data Statistik 5) Seksi Pengelolaan Data Statistik												
																	Mem bangun Metadata Statistik Sektoral	Tersusunnya Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Buku Standar Metadata Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tersusun	20 buku	Rp. 117.954.756	25 buku	Rp. 129.750.232	50 buku	Rp. 142.725.255	Seksi Analisis Data Statistik													
																	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Statistik Sektoral	47 OPD	Rp. 71.372.168	1 Kali	Rp. 78.509.385	1 Kali	Rp. 86.360.322	Seksi Analisis Data Statistik													
																	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Peran dan Fungsi Wali Data Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang persetujuan/pengesahan oleh Wali Data	47 OPD	Rp. 86.996.245	47 OPD	Rp. 95.695.870	47 OPD	Rp. 105.265.456	Seksi Pengelolaan Data Statistik													

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM								KEGIATAN								SUB KEGIATAN								Penanggung jawab									
			TARGET								KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET								SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target											
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Kondisi Awal				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	2021	Rp.				2022	2023		Rp.								
																			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlathnya SDM di bidang statistik	Jumlah SDM di Bidang Statistik yang dilatih	/A/	/A/	61 orang	Rp 100.000.000	122 orang	Rp 110.000.000	Seksi Pengelolaan Data Statistik								
																		Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur aplikasi statistik sektoral terintegrasi	Pembuatan Aplikasi Statistik Sektoral yang Terintegrasi		/A/	/A/	1 Kali	Rp 100.000.000	1 Kali	Rp 110.000.000	Seksi Analisis Data Statistik								
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	persentase OPD dengan kategori : Baik, Cukup, Perlu Perbaikan dan Tidak Layak	25%	25%	37%	48%	77%	87,76%	87,76%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di OPD	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1) Terlaksananya Peminatan Pengamanan Data Informasi dan Komunitas Keamanan Informasi di Kalimantan Barat 2) Terlaksananya Pembinaan Data Keamanan Informasi se-Kalbar untuk mendukung Indeks KAMI 3) Terlaksananya Sterilisasi Tempat Strategis Untuk Pengamanan Informasi Daerah	1) Jumlah Kabupaten yang dibina dalam Pengamanan Data Informasi dan Komunitas Keamanan Informasi di Kalimantan Barat 2) Jumlah OPD yang dibina dalam Keamanan Informasi dan data se-Kalbar untuk mendukung Indeks KAMI 3) Jumlah Sterilisasi Tempat Strategis Untuk Pengamanan Informasi Daerah	1) 4 kabupaten/ kota 2) 47 OPD 3) ruang kerja pimpinan / 1 tahun	Rp 59.993.408	1) 14 Kab/Kota 2) 47 OPD 3) ruang kerja pimpinan / 1 tahun	Rp 100.000.000	1) 14 Kab/Kota 2) 47 OPD 3) ruang kerja pimpinan / 1 tahun	Rp 110.000.000	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi								
																		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	1) Terlaksananya Penyelenggaraan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah 2) Terbetuk dan beroperasinya Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 3) Terlaksananya Penerbitan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1) Jumlah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Dukungan Persandian Untuk Informasi Daerah 2) Jumlah Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk dan beroperasi 3) Jumlah Pejabat dan ASN yang memiliki Tanda Tangan Elektronik	1) 4 kabupaten/ kota 2) 1 - 3) -	Rp 238.167.463	1) 14 kabupaten/ kota 2) 1 Tim CSIRT beroperasi untuk 1 tahun 3) 150 Orang	Rp 261.984.209	1) 14 kabupaten/ kota 2) 1 Tim CSIRT beroperasi untuk 1 tahun 3) 150 Orang	Rp 288.182.630	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi									
																		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	tersusunnya produk hukum daerah di bidang persandian	Jumlah produk hukum daerah di bidang persandian yang disusun	/A/	/A/	1 produk hukum daerah	Rp 75.000.000	1 produk hukum daerah	Rp 75.000.000	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi									
																		Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	Tersusunnya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi	Jumlah dokumen inventarisasi analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang	/A/	/A/	1 dokumen	Rp 75.000.000	1 dokumen	Rp 75.000.000	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi									
										Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Operasional Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1) Tersedianya Perencanaan dan Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah 2) Tersedia dan beroperasinya layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah	1) Jumlah OPD Penggunaan Layanan email dan Persandian / Sanapati Perangkat Daerah 2) Jumlah perangkat layanan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah yang tersedia dan beroperasi	/A/	/A/	1) 47 Email Sanapati OPD 2) 1 perangkat JKS	Rp 200.000.000	1) 47 Email Sanapati OPD 2) 1 perangkat JKS	Rp 100.000.000	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Terselenggaranya urusan komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	1.Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan yang disusun : 1. Analisis Resiko 2. Koordinasi dan Sinronisasi Perencanaan Tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi dan Nasional 3. Forum OPD 4. Pejalan 5. RENJA 6. SIRUP	6 Dokumen dan 12 Laporan	Rp 102.954.419	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp 178.127.500	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp 195.940.250	Kasubag Renja dan Movev								



PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN							Penanggung jawab						
			TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target							
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				2021		Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
																				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000		
		3. Persentase pelayanan administrasi kepegawain sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1/4	1/4	100%	Rp. 50.000.000	100%	Rp. 60.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur		
																			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian / PDH	Jumlah Pakaian Dinas Harian/ PDH yang diadakan	1 Paket	Rp. 61.346.750	Paket	Rp. 67.481.425	Paket	Rp. 74.229.568	Kasubbag Umum dan Aparatur		
																			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Tersedianya dokumen Penilaian Angka Kredit Terhadap Pranata Humas/Pranata Komputer dan Terkelolanya dokumen administrasi kepegawain	Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Terhadap Pranata Humas/Pranata Komputer dan Terkelolanya dokumen administrasi kepegawain	1 Dokumen	Rp. 123.880.191	1 Dokumen	Rp. 136.268.210	1 Dokumen	Rp. 149.895.031	Kasubbag Umum dan Aparatur		
																			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawain yang disusun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000			
																			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dalam 1 Tahun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000			
																			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang Pensiun dalam 1 tahun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000			
																			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000			
																			Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pemindahan Tugas ASN	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 30.000.000	1 Dokumen	Rp. 33.000.000			
																			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	Rp. 32.500.000	100%	Rp. 35.750.000	100%	Rp. 39.325.000	Kasubbag Umum dan Aparatur		
																			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PNS yang mengikuti sosialisasi	Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi	100%	Rp. 10.000.000	100%	Rp. 15.000.000	100%	Rp. 16.500.000	Kasubbag Umum dan Aparatur		
																			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	Persentase PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	Rp. 13.000.000	100%	Rp. 15.000.000	100%	Rp. 16.500.000	Kasubbag Umum dan Aparatur		
		4. persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 28.777.200	1 Dokumen	Rp. 31.654.920	Kasubbag Keuangan dan Aset		
																			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000	Kasubbag Keuangan dan Aset		
																			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000	Kasubbag Keuangan dan Aset		
																			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1/4	1/4	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000	Kasubbag Keuangan dan Aset		

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM								KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN								SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	SUB KEGIATAN						Penanggung jawab				
			TARGET											TARGET											Target										
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Kondisi Awal				2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	2021	Rp.				2022	Rp.	2023	Rp.							
																			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	/A	/A	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	/A	/A	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	/A	/A	1 Dokumen	Rp. 25.000.000	1 Dokumen	Rp. 27.500.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	Persentase pelayanan administrasi kepegawai sesuai prosedur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 39.044.000	Rp. 42.948.400	Rp. 47.243.240	Kasubbag Umum dan Aparatur
																			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp. 61.040.266	100%	Rp. 67.144.293	100%	Rp. 73.858.722	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	100%	Rp. 8.887.728	100%	Rp. 9.776.501	100%	Rp. 10.754.151	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Persentase penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	100%	Rp. 55.080.000	100%	Rp. 60.588.000	100%	Rp. 66.646.800	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp. 37.426.000	100%	Rp. 41.168.600	100%	Rp. 45.285.460	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan berlangganan yang disediakan dalam setahun terdiri dari 2 koran dan 3 bacaan lainnya	5 jenis/bulan	Rp. 6.400.000	5 jenis/bulan	Rp. 7.040.000	5 jenis/bulan	Rp. 7.744.000	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Penyediaan Bahan/ Material	Terlaksananya penyediaan Bahan/ Material	Persentase penyediaan Bahan/ Material	/A	/A	100%	Rp. 50.000.000	100%	Rp. 55.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	/A	/A	100%	Rp. 30.000.000	100%	Rp. 33.000.000	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah dalam 1 tahun	1 Dokumen	Rp. 98.021.437	1 Dokumen	Rp. 107.823.581	1 Dokumen	Rp. 118.605.939	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp. 16.027.544	1 Dokumen	Rp. 17.630.298	1 Dokumen	Rp. 19.393.328	Kasubbag Umum dan Aparatur							
																			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp. 100.000.000	4 motor	Rp. 110.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
																			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	/A	/A	4 motor	Rp. 100.000.000	4 motor	Rp. 110.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Persentase tersedianya Mebelair kantor	/A	/A	100%	Rp. 100.000.000	100%	Rp. 110.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 mesin	Rp. 65.674.540	3 mesin	Rp. 72.241.994	3 Mesin	Rp. 79.466.193	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tetap Lainnya	/A	/A	1 paket	Rp. 50.000.000	1 paket	Rp. 55.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							
																			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Aset Tak Berwujud	Jumlah Paket Pengadaan Aset Tak Berwujud	/A	/A	1 Paket	Rp. 50.000.000	1 Paket	Rp. 55.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset							



PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN						Penanggung jawab															
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET							SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator		Target														
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir					2021	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.									
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	NA	1 Paket	Rp. 100.000.000	1 Paket	Rp. 110.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset											
																		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	Rp. 99.997.788	1 Paket	Rp. 109.997.567	1 Paket	Rp. 120.997.323	Kasubbag Keuangan dan Aset											
																		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa surat menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100%	Rp. 1.991.925	100%	Rp. 2.191.118	100%	Rp. 2.410.229	Kasubbag Umum dan Aparatur											
																		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Rp. 216.500.000	100%	Rp. 238.150.000	100%	Rp. 261.965.000	Kasubbag Umum dan Aparatur											
																		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	100%	Rp. 8.400.000	100%	Rp. 9.240.000	100%	Rp. 10.164.000	Kasubbag Umum dan Aparatur											
																		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani, Kebersihan Kantor dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik melalui PPD Pembantu di OPD	1) Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan Rohani, dan 2) Jumlah Gedung Kantor yang mendapat jasa kebersihan 3) Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang disusun Pembantu di OPD	1) 54 ASN 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan	Rp. 260.205.561	1) 54 ASN 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan	Rp. 286.226.117	1) 54 ASN 2) 1 Gedung 3) 1 Dokumen Laporan	Rp. 314.848.729	Kasubbag Umum dan Aparatur											
																		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan yang mendapat jasa pemeliharaan, dan pajak yang dibayarkan	1) 2 mobil dan 2 motor	NA	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp. 80.000.000	1) 2 mobil dan 2 motor	Rp. 88.000.000	
																		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dibayar pajaknya	5 mobil dan 5 motor	Rp. 85.840.000	5 mobil dan 5 motor	Rp. 94.424.000	5 mobil dan 5 motor	Rp. 103.866.400	Kasubbag Keuangan dan Aset											
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
																		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat yang mendapat Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA								
																		Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	NA	NA	1 Tahun	Rp. 20.000.000	1 Tahun	Rp. 22.000.000												
																		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan AC/ kipas angin, pemeliharaan Komputer, Printer, alat studio dan komunikasi, dan Generator	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan terdiri dari : AC (45 unit), Komputer (63 unit), Printer (43 unit), Genset (1 unit)	170 unit	Rp. 112.105.200	170 unit	Rp. 123.315.720	170 unit	Rp. 135.647.292	Kasubbag Keuangan dan Aset											

PROGRAM										KEGIATAN							SUB KEGIATAN							Penanggung jawab						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET							KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator	Target									
			Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022				2023	Kondisi Akhir	2021		Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	
																		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang mendapat pemeliharaan	N/A	N/A		Rp	20.000.000		Rp	22.000.000		
																		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang mendapat pemeliharaan	N/A	N/A		Rp	20.000.000		Rp	22.000.000		
																		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang mendapat biaya pemeliharaan	1 Gedung	Rp	10.000.000	12 bulan	Rp	11.000.000	12 bulan	Rp	12.100.000	Kasubbag Keuangan dan Aset
																		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat pemeliharaan	n/g	N/A	1 Sarpras	Rp	80.000.000	1 Sarpras	Rp	88.000.000		
																		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	N/A	N/A	1 Sarpras Pendukung	Rp	80.000.000	1 Sarpras Pendukung	Rp	88.000.000		